

# E-GOVERNMENT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG

Agus Setiawan

*Jurusan Sistem Informasi STMIK Pringsewu Lampung*

*Jl. Wisma Rini No. 09 pringsewu Lampung*

*Telp. (0729) 22240 website: [www.stmikpringsewu.ac.id](http://www.stmikpringsewu.ac.id)*

*E-mail : Agussetiawan666@yahoo.com*

## ABSTRAK

*Era globalisasi sekarang ini sangat diperlukan adanya teknologi informasi untuk mengimbangi adanya perkembangan informasi. Salah satunya dengan membuat E-Government yang dapat dijadikan tempat berkomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak-pihak lainnya, misalnya dengan investor. Pergeseran paradigma ini dapat dimaknai bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sejak tahap perencanaan untuk mengetahui tentang jenis pelayanan yang dibutuhkan, metode pelayanan yang terbaik, mekanisme pemantauan maupun evaluasi dalam pelayanan, sehingga tanggung jawab dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bukan hanya dipihak penyedia layanan, tetapi masyarakat ikut tanggung jawab. Penerapan e-government di Indonesia pun dinilai baik dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam peranan e-government dan struktur informasi yang dimiliki oleh Pemerintahan di Indonesia. E-Government merupakan pengguna TI dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga transparansi, kontrol, akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintah meningkat.*

*Kata Kunci : e-government, masyarakat, TIK, partisipasi.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukan otonomi daerah yang memberikan suatu kewenangan dan peluang yang sangat luas bagi daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mendorong setiap daerah untuk memajukan daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. E-Government merupakan pengguna teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mewujudkan praktik pemerintah yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga transparansi, kontrol, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah meningkat (Heeks 1999).

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Peranan teknologi informasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintah dewasa ini dirasakan semakin penting. Menyadari akan pentingnya peranan sistem

informasi dalam sistem pemerintahan dan didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sekarang ini maka dirasa perlu untuk merealisasikannya dalam sebuah aplikasi yang dikenal dengan e-government sehingga dapat mendukung fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik yang memenuhi kriteria better, cheaper dan faster. Selain ini diperlukan media yang mudah diakses, sehingga masyarakat sewaktu-waktu dapat mengetahui apa saja kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk dukungan, sanggahan, maupun kritikan.

### 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dapat dirumuskan suatu permasalahan bagaimana kita bisa menciptakan E-Government yang lebih memfokuskan kepada publik, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

### 3. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah diatas maka penulis akan membahas mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

### 4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi meningkatkan partisipasi masyarakat..

## 5. Manfaat Penelitian

Selain maksud dan tujuan diatas, diharapkan juga dari peneliti ini dapat diambil manfaatnya sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa  
Diharapkan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.
2. Bagi masyarakat  
Diharapkan dengan penerapan rancangan web ini dapat memberikan kemudahan pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
3. Bagi Pemerintah  
Dengan adanya situs web pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan komunikasi anatar lembaga.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Sistem

Pengertian Sistem Menurut Davis, G.B: Sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.

Pengertian Sistem Menurut Harijono Djojodihardjo: Suatu sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional.

Pengertian Sistem Menurut Lani Sidharta: Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau procedure-prosedure/bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang.

### 2.2 Definisi Informasi

*Pengertian Informasi* Menurut Raymond Mc.leod Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang .

Pengertian Informasi Menurut Jogiyanto HM., (1999: 692), "Informasi dapat didefinisikan sebagai

hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan”

Abdul Kadir (2002: 31); McFadden dkk (1999) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian informasi adalah pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian/penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan (knowledge) bagi penggunaannya (Wikipedia - Indonesia).

Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

### 2.3 Definisi Sistem Informasi

Pengertian Sistem Informasi Menurut John F. Nash (1995:8) yang diterjemahkan oleh La Midjan dan Azhar Susanto, menyatakan bahwa Sistem Informasi adalah : Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat

Pengertian Sistem Informasi Menurut Kertahadi (dalam Fatta, 2007) sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi suatu perusahaan yang menyajikan sinergi organisasi pada proses (Murdick & Ross, dalam Fatta 2007).

Pengertian sistem informasi menurut Rommey (1997:16) yang dialihbahasakan oleh Krismiaji (2002; 12) adalah sebagai berikut : Sistem Informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkn, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2.4 E-government

Secara umum dapat dikatakan bahwa e-government atau yang biasa disingkat E-Gov adalah suatu aplikasi berbasis computer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan atau layanan pemerintah warga masyarakat atau yang sering disebut dengan istilah G2C (Government to Citizen). Di samping itu juga hubungan antara pemerintah dengan perusahaan yang disebut dengan G2B (Government to Business). Bahkan terhadap pemerintah daerah atau Negara lain yang sering disebut G2C (Government to Government) sebagai mitranya.

Secara filosofis yang melatar belakangi terbentuknya partisipasi adalah pemerintah yang demokratis memiliki makna pemerintahan berasal dari rakyat yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu untuk memenuhi kebutuhan prose politik dan penyelenggaraan Negara. Pemerintah yang demokratis dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel partisipasi rakyat disini akan berdampak pada prose evaluasi maupun monitoring kinerja pemerintah sehingga meminimalisir penyalahgunaan wewenang (Abdul Salam (editor), 2006).

### Kualitas Layanan E-Government

Pemerintah di alam terbuka, demokratis dan transparan sekarang ini harus memperhatikan masalah kualitas pelayanan kepada masyarakat kualitas layanan adalah : *“Service quality, as perceived by customers, can be defined as the extent of discrepancy between customers expectations or desires and their perceptions:.* Semakin kecil perbedaan antara harapan dengan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, semakin baik kualitas layanan pemerintah (Zeithaml et al 1990).

Menurut James S.L. Yong (2003) *“...e-government as the government’s use of technology, in particular, web-based Internet applications to enhance access and delivery of government services to citizens, business partners, employees and other government entities”*. Pengertian diatas memberikan penjelasan bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah khususnya penggunaan aplikasi *internet* berbasis *web* untuk meningkatkan akses dan pemberian layanan pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis, pegawai atau karyawan, dan badan pemerintah lain

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian E-Government adalah *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. E-

*government* secara umum memiliki tiga bentuk relasi/aspek yakni:

1. *Government to Citizens (G2C)*  
Aplikasi ini fokus pada pelayanan *online* di mana pemerintah bekerja untuk warga negaranya. Evans dan Yen (2007) mejabarkan G2C sebagai sektor pelayanan yang fokus pada kemampuan pemerintah dan warga negara untuk bertukar informasi satu sama lain dalam sebuah bentuk elektronik yang efisien.
2. *Government to Business (G2B)*  
Aplikasi ini mengacu pada penyediaan pelayanan informasi bagi kalangan bisnis. Sektor ini fokus pada transaksi antara pemerintah dan pebisnis dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan mengumpulkan informasi yang lebih akurat. Tujuan dari jenis pelayanan ini yaitu untuk memudahkan pemerintah membeli sesuatu, membayar tagihan, dan melakukan bisnis dengan biaya yang lebih efektif, dan juga untuk membantu dalam memperoleh data untuk menganalisis atau untuk membantu dalam pembuatan keputusan.
3. *Government to Governments (G2G)*  
Sektor ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan ketika melakukan pertukaran informasi antara pemerintah lokal dan pusat. Manfaat dari sektor ini yaitu peningkatan kemampuan dalam hal pendeteksi tindak kriminal, sistem respon terhadap tindakan darurat, penegakan hukum, dan keamanan wilayah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat terdapat koordinasi antara pemerintah lokal, negara bagian, dan federal dalam informasi pemberitahuan adanya bencana.

### Manfaat E-Government

Sebuah Negara memutuskan untuk mengimplementasikan E-Government karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan maka akan memberikan sejumlah manfaat seperti:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas Negara lainnya.
2. Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintah.
3. Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan.
4. Menciptakan masyarakat berbasis komunikasi yang lebih berkualitas.

## **Infrastruktur E-Government**

Saat infrastruktur teknis dinilai telah mencakupi paling tidak untuk membangun system E-Government yang sederhana . Ktersediaan mencapai 3,2 GHz dengan system jaringannya dapat memberikan dukungan yang cukup memadai.

Apalagi teknologi media transmisi terus berkembang. Dimana kini dapat dijumpai jaringan kabel untuk internal lingkungan pemerintah, penggunaan jalur telepon, VSAT, dan gelombang radio untuk melayani akses ke lingkungan internet dan aplikasi E-Government tersebut. Dari segi software, ketersediaan aplikasi web dan data base untuk menciptakan system E-Government yang interaktif juga sudah tersedia, bahkan sangat bervariasi.

## **Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Aparatur Pemerintah sebagai pemimpinjuga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggungjawab atas perubahan didalam masyarakat maupun perubahan didalam masyarakat maupun perubahan social kemasyarakatan, Untuk itu pemerintah dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berfikir atau bebrbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerakan pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat.

- Sebagai dinamisator : tentunya pemerintah desa dalam hal ini harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
- Sebagai katalisator : ini berkaitan dengan aparatur pemerintah dalam melihat dan mengkoordinir langsung factor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
- Sebagai pelopor ; sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat.

## **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi merupakan kata yang berasal dari bahasa inggris participate yang berarti mengikut sertakan, mengambil bagian. Dalam kamus ilmiah populer, batasan arti partisipasi adalah pengambilan bagian (didalamnya), keikutsertaan, peranserta, penggabungan firi (menjadi peserta).

Definisi baku dari partisipasi sampai saat ini masih belum ada, barangkali karena terlalu banyak konsepsi yang mengandung berbagai arti, sehingga banyak penulis menggunakan beberapa pandangan tentang partisipasi. Meletakkan dan menggunakan sebuah konsep partisipasi lebih dapat dilihat sebagai proses metode n sebuah system. Potensi ini harus dilaksanakan sehingga mereka juga bisa ikut menentukan bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan public diperlukan pendekatan baru yakni dengan memberdayakan potensi warga dari masyarakat sehingga peran dan partisipasi masyarakat menjadi bertambah dalam menyalurkan aspirasinya.

## **Kemampuan Pemerintah dalam Pelaksanaan Kebijakan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Pemerintah dalam hal ini adalah aparatur pemerintah sebagai administrator kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal ini pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan program pemerintah dalam pelaksanaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.

Beberapa kebijakan umum yang disarankan, Khususnya untuk Pemerintah Daerah yang belum atau baru akan dilaksanakan E-Government adalah :

1. Pembangunan E-Government disusun dalam 5 (lima) tahapan, tiap tahapan direncanakan selama 1 (satu) tahun, disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang lazim berlaku di Pemerintah Daerah, seperti RKPD, RENSTRADA, dan lain-lain.
2. Disetiap tahapan dilaksanakan pengembangan aplikasi dari semua kategori. Untuk kategori pemerintah (G2G), ditekankan pada pembangunan aplikasi untuk lingkup internal Pemda dan legislative, baru diperluas ke kecamatan dan kelurahan. Meskipun begitu, ditahap awal sebaiknya prototype jaringan system informasi yang utuh dari kelurahan sampai kepusat.
3. Untuk kategori bisnis (G2B), diprioritaskan pada system aplikasi untuk pelayanan UKM, dan BUMN/BUMD, termasuk RSUD.
4. Sedangkan untuk kategori umum di prioritaskan pada aplikasi E-Government Portal dan aplikasi – aplikasi pendukung seperti kolaborasi dan koordinasi, dan system pendukung keputusan.

### **Hambatan Dalam Mengimplementasikan E-Government**

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan e-government di Indonesia antara lain :Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: "Apabila bila dipersulit mengapa dipermudah?". Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini.

1. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: "Apabila bila dipersulit mengapa dipermudah?". Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini.
2. Kultural mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISP 9000 dan juga menjadi bagian dari standard software engineering.
3. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal dibidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/industry.
4. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari E-Government. Sayang sekali kekurangan kemampuan

pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjadi solusi yang salah dan mahal.

5. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telpon, atau bahkan aliran listrik. Klupun semua fasilitas ada, harganya masih relative mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan padanan (budget) untuk keperluan ini.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pengumpulan Data**

Jenis dan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa metode yaitu metode penelitian kualitatif. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer (hasil wawancara/kuisisioner dan survey) dan data sekunder (tinjauanliteratur dan data yang diambil dari berbagai instansi). Data Primer dikumpulkan melalui teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat yang dikur melalui 5 indikator yaitu indicator prakarsa, indicator pembiayaan, indicator pengambilan keputusan, indicator kemampuan mobilitas tenaga, indicator pelaksana operasional pembangunan. Indikator dalam penelitian ini diambil dari lima macam kegiatan yang ada di masyarakat yaitu kegiatan musyawarah, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan.

Berdasarkan pengukuran-pengukuran yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian akan mengembangkan model peranan E-Government dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian akan mengidentifikasi komponen-komponenya, dan sifat hubungan komponen untuk setiap model. Berdasarkan informasi yang didapat dari website pemerintahan dan menggunakan kerangka kerja dan alat ukur yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu diantaranya : 1) Inovasi dan penggunaan IT (Teknologi Informasi) untuk menyediakan informasi dan pelayanan dari pemerintah, 2) Tingkat efisiensi, 3) Pengambilan Investasi, 4) Tingkat kemudahan didalam menggunakan layanan informasi online, 5) focus akan kebutuhan masyarakat, 6) Tingkat kemudahan untuk mengakses setiap level pemerintahan, 7) Perlindungan dan kebijakan privasi, 8) Tingkat keamanan dan kemudahan pemeriksaan, 9) Penggabungan pengukuran kualitatif dan kuantitatif, 10) Bukti akan keberadaan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat

swasta, dan 11) Tingkat efisiensi mekanisme evaluasi.

### 3.2 Sistem yang sedang berjalan

Untuk kondisi saat ini petugas dan masyarakat kesulitan mendapatkan informasi dan pengolahannya, untuk mendapatkan informasi dari desa masyarakat harus mendatangi balai desa dan bertanya kepada petugas desa atau aparat desa, Fenomena inilah yang saat ini ada pada kabupaten pringsewu dalam mendapatkan informasi. oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang menangani pengolahan informasi antara aparat kabupaten Pringsewu dengan masyarakat.

Dengan sistem informasi yang berbasis *web* pada kabupaten pringsewu masyarakat dapat mengetahui informasi yang ada di kabupaten pringsewu melalui *handphone*, *internet*, atau alat-alat elektronik lainnya yang mengakses informasi yang ada. Melalui media ini mereka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan kapanpun dan dimanapun dengan mudah dan cepat serta didukung dengan tingkat keakuratan data. Dengan hadirnya *internet*, memberikan manfaat tersendiri salah satunya yaitu *E-Government* secara *on-line*.

Fenomena inilah yang kemudian meyakinkan penulis untuk membuat aplikasi *Web* yang menampilkan informasi dari Kabupaten Pringsewu yang dapat diakses online oleh masyarakat kapan saja dan dimana saja menggunakan media *internet*, Dalam aplikasi web ini berisi informasi dan pelayanan masyarakat dari kabupaten Pringsewu yang dapat diakses berdasarkan kebutuhan atau kategorinya, maka dari itu penelitian ini diberi judul “*E-Government* Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Kabupaten Pringsewu” sehingga dapat menerapkan keilmuan di bidang sistem informasi dan hasilnya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.

### 3.3 Sistem yang diusulkan e-government

- Memudahkan kepada siapa saja perangkat desa untuk bisa memberikan pelayanan, sehingga tidak ada lagi kendala yang biasa ditemui masyarakat seperti petugas pada bidang pelayanan masyarakat sedang tidak di tempat.
- Diharapkan dapat dijadikan acuan dalam memberikan arah yang tepat dalam menentukan sebuah kebijakan maupun keputusan karena didukung oleh informasi akurat dan cepat, khususnya di Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- Dijadikan solusi untuk menggantikan sistem yang sudah berjalan secara manual dan diberlakukan di pemerintahan Kabupaten Pringsewu.

## 4.HASIL PENELITIAN

Perkembangan umum definisi E-Government dipahami sebagai penyampaian layanan pemerintah secara otomatis. Menurut Wyld (2004) E-Government merupakan suatu pemrosesan secara elektronik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengkomunikasikan, penyebaran atau mengumpulkan informasi, sebagai fasilitas transaksi atau perijinan untuk suatu tujuan tertentu.

Alamat E-Government pemerintahan adalah [www. Pringsewukab. go. id](http://www.Pringsewukab.go.id), secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Tampilah Halaman Utama website pringsewu

### 3.4 Desain penampilan

- Nama domain mudah diingat
- Tampilan keseluruhan
- Aktivitas domain

### 3.5 Isi

- Fasilitase-mail, forum, dialog form, pencarian, link dan transaksi
- Layanan public/eksternal meliputi informasi public, forum, panduan e-mail.
- Layanan pemerintah/internal meliputi
- E-mail internet, data pegawai, link lembaga pemerintah lain.
- Kesesuaian isi dengan visi dan misi lembaga.
- Up dating dan informasi atau berita.

### Presence (Keberadaan)

Merupakan halaman situs yang memberikan paparan dan informasi mengenai keberadaan organisasi pemerintah yang bersangkutan secara on-line. Pada umumnya halaman situs ini tidak lebih dari sekedar company profile yang menginformasikan sebagai data dan informasi yang terkait dengan aktivitas-aktivitas organisasi pemerintah tersebut. Konsekuensinya, setiap kali ada perkembangan atau perubahan, maka halaman situs tersebut harus di update, sehingga para pengunjung situs akan selalu

mengetahui hal-hal baru yang terkait dengan keberadaan penyaji situs (organisasi pemerintah). (Yusuf.S(2007)).

### **Interaksi**

Halaman situs yang disajikan pemerintah tidak sekedar menyajikan peranan dan informasi keberadaannya secara on-line, tetapi juga disertai fasilitas komunikasi secara elektronik (e-mail). Kebanyakan situs yang dibangun oleh pemerintah Indonesia baru memiliki tahap interaksi.

Penyajian fasilitas e-mail ini dimaksudkan untuk memberikan titik kontak penyaji situs dan pengunjung situs menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai macam hal yang terkait keberadaan. (Suyanto, M, (2003)).

### **Transaksi**

Tingkat transaksi menunjukkan bahwa dalam halaman situs selain memberikan paparan informasi mengenai organisasi pemerintah yang bersangkutan secara on-line dan fasilitas komunikasi secara elektronik dalam bentuk fasilitas e-mail, halaman situs tersebut juga memberikan fasilitas yang memungkinkan terjadinya kesepakatan antara pengunjung situs dan organisasi pemerintah secara legal melalui on-line system.

Pada tahap ini layanan yang diberikan pemerintah tidak sebatas memberikan jawaban dan penjelasan kepada pengunjung situs, tetapi juga melayani kebutuhan lain seperti perijinan, perpanjangan atau suatu kartu identitas tertentu, atau yang lainnya. Tahap transaksi masyarakat valifitas situs termasuk keamanannya.

Faktor kritis yang perlu dipertimbangkan pada tahap ini adalah keamnan untuk proses *approval* dari pihak pemerintah. Proses *approval* harus dipastikan hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah stuktur memiliki kewenangan untuk melakukannya. (oetomo, Budi Sutedjo Dharma, (2001)).

### **Transformasi**

Transformasi merupakan halaman situs yang memberikan paparan informasi mengenai keberadaan organisasi pemerintah yang bersangkutan secara on-line, fasilitas komunikasi secara elektronik (e-mail), fasilitas untuk terjadinya kesepakatan antara pengunjung situs dan organisasi pemerintah terkait secara legal melalui on-line system. Selain itu pada tahap transformasi juga dapat fasilitas untuk terjadinya arus informasi timbale balik antara para pengunjung situs serta organisasi pemerintah terkait, dibawah pengelolaan pemerintah yang bersangkutan (Wyld(2004)).

Tingkatan pada tahap transformasi membutuhkan persyaratan keterbukaan pihak pemerintah, karena

pengunjung situs (masyarakat luas) menjadi salah satu elemen dalam system informasi pemerintah yang bersangkutan artinya masyarakat merupakan pihak yang terlibat dalam system tersebut. Untuk mencapai tahap ini, terlebih dahulu pemerintah harus mendefinisikan secara jelas mengenai struktur organisasi dan skema system operasinya yang tentunya melibatkan masyarakat. Satu hal yang perlu dicermati secara kritis adalah kejelasan tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban dari system elemen yang terlibat dalam system operasi pemerintah yang bersangkutan.

Pemahaman pengunjung situs dalam konteks seperti yang dijelaskan pada tingkatan tersebut adalah masyarakat dalam arti luas yang mewakili individu dengan segala jenis status dan profesi, dan lembaga formal maupun non-formal. (Djoko Agung Harijadi 2005)).

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Sosialisasi E-Government perlu dilakukan secara konsisten, kontinyu dan insentif kepada masyarakat dikarenakan masyarakat belum mengerti apa dan bagaimana aplikasi E-Government serta manfaat yang dapat mereka ambil.
2. Perlu dilakukannya pula suatu penelitian baik itu pelatihan yang ditunjukan bagi karyawan maupun masyarakat karena tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah.
3. Peranan E-government perlu pengawasan secara terus menerus karena bisa jadi sitem manajemennya akan berubah menjadi tradisional lagi jika tidak diawasi secara langsung.
4. Perlu adanya up dating informasi setiap harinya dikarenakan pergerakan informasi berjalan pesat.
5. Strategi meningkatkan partisipasi masyarakat yang sangat diperlukan untuk kelangsungan E-Government.

### **5.2 Saran**

Penerapan E-Government perlu dievaluasi secara terus menerus sehingga dapat diketahui bagian manakah yang tidak berjalan secara optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, M ; Samaraji, M. Layoori. 2005. *Analisa Hasil Survey Kondisi Teknologi Informasi Kabupaten Dalam Rangka Pengembangan Rencana Strategi E-Government*. Disampaikan dalam Konferensi Nasional Sistem Informasi 2005 di ITB Bandung.
- Djoko Agung Harijadi (2005), *Aplikasi E-Government Pemerintah Daerah*, Departemen Informasi dan Komunikasi, Jurnal Prosiding

- Konferensi Nasional Sistem Informasi,  
Bandung.
- Indrajit, Richardus Eko: Rudianto, Dudy: Zainudin,  
Akbar. 2005. *e- Government In Action*. Andi  
Offset. Yogyakarta. Leibo, Jefta 1995. *Sosial  
Pedesaan*. Andi offt. Yogyakarta.
- Indrajit, Richardus Eko : Rudianto, Duddy:  
Zainuddin, Akbar. 2005. *E-Government In  
Action*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Id.wikipedia.org?wiki/kabupaten\_pringsewu(2014)
- Oetomo, Budi Sutejo Dharma. 2003. *Jargon E-  
Besebess. Plus 27 Artikel Populer Dan 13  
Daftar Situs*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Oetomo, Budi Sutejo Dharma, (2011).*Perspektif E-  
Bussines:Tinjauan Teknis, Managerial dan  
strategi*, Penerbit Andi Offest, Yogyakarta.
- Rahardjo, Budi. 2001. Membangun E-Government.  
Dipresentasikan pada Seminar Nasional  
Jaringan Komputer II. Yang diselenggarakan  
oleh ethnic club, STMIK Dipanegara  
Makasar, 19 Mei 2001.  
<http://www.geocities.com/seminartsc>.
- Retnowati, Daru: Kismantoroadji, Teguh;  
Mudiyanto, Eko. 2006. *Dasar- Dasar  
Komunikasi Dan Informasi Pertanian*. UPN  
"Veteran" Yogyakarta Press. Yogyakarta.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*.  
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.  
Jakarta.